

**PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM
MINANGKABAU (LKAAM) DALAM PROSES PENYUSUNAN
PERDA PROVINSI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh :

ANDHIKA PUTRA

Bp.1110832004

Pembimbing I : Dr Aidinil Zetra,MA

Pembimbing II : Sadri , S.IP, M.Soc,Sc

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

Andhika Putra . 1110832004 . Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Peran Politik Lkaam Dalam Proses Penyusunan Perda Provinsi Nomor 7 Tentang Nagari. Pembimbing (I) Dr. Aidinil Zetra, M.A dan Pembimbing (II) Sadri, S.IP, MSoc,Sc.

Kekuatan politik seperti organisasi masyarakat sipil mampu menjadi kekuatan pengimbang terhadap kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Keberadaannya sangat diperlukan dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan - kebijakan pemerintah untuk mencapai kepentingan bersama di dalam masyarakat. penelitian ini berfokus kepada bagaimana Peran Politik LKAAM dalam Proses Penyusunan Perda Provinsi Nomor 7 tentang Nagari. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah konsep kekuatan politik dalam melihat kekuatan politik LKAAM Sumbar terkait dalam mempengaruhi perumusan sebuah kebijakan. Selanjutnya untuk Melihat Bagaimana Peran Politik LKAAM dalam Proses Penyusunan Perda Provinsi Nomor 7 tentang Nagari, peneliti melihat teori yang dijelaskan oleh Ryker mengenai pola hubungan politik sebuah lembaga (NGO/LSM) terhadap pemerintah atau negara. Teori yang dijelaskan oleh Ryker ini lebih menekankan pada empat dimensi ruang politik NGO/LSM, yakni; Orientasi isu, organisasional, kebijaksanaan dan finansial, dalam memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan negara atau pemerintah Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Untuk pemelihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan LKAAM Sumbar sebagai kekuatan politik LKAAM telah menjalankan fungsi nya dalam mempengaruhi perumusan kebijakan - kebijakan mengenai adat isitiadat di Sumatera Barat, LKAAM ikut serta secara aktif dalam perumusan perda provinsi tentang nagari, yang telah di mulai pembahasannya di awal tahun 2015, LKAAM ikut serta dan aktif dalam pemabahasan perda provinsi tentang nagari dan sesuai dengan fungsi LKAAM sebagai lembaga komunikasi adat ,dengan ikut serta aktif LKAAM dalam perumusan perda provinsi tentang nagari aspirasi, harapan dan saran masyarakat tentang adat telah LKAAM sampaikan dan perjuangkan dalam perumusan perda tentang nagari tersebut.

Kata kunci : Kekuatan Politik, Organisasi Masyarakat Sipil, LSM, Perda Nagari

ABSTRACT

Andhika Putra. 1110832004. Department of Political Sciences Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Political Role of West Sumatera Traditional Institution (LKAAM) In process of Formulating Regional Regulations Number 7 of 2018 About Nagari.

Supervisor1: Dr.Aidinil Zetra, MA and Supervisor2: Sadri, S.IP, MSoc,Sc

Political Power such as civil society organizations are able to become a counterweight to the power of the state in a democratic system. Its existence is indispensable in monitoring and controlling government policies to achieve common interests in society. this study focuses on how the role of LKAAM Politics in the process of drafting Provincial Regulation Number 7 About Nagari. The concept used in research is the concept of political power in viewing the political power of West Sumatra LKAAM related in influencing the formulation of a policy. Furthermore, to see how the role of LKAAM politics in the process of drafting Provincial Regulation Number 7 of 2018 About Nagari, the researchers looked at the theory described by Ryker regarding the pattern of political relationships of an institution (NGO / NGO) to the government or state. The theory described by Ryker is more emphasis on the four dimensions of the political space NGO / NGO, namely; Orientation issues, organizational, wisdom and financial, in positioning itself when dealing with the state or government This research uses qualitative research with descriptive case study method. For informant pick research in this research use purposive sampling technique. The result of this study explains that the existence of LKAAM West Sumatra as a political power LKAAM has performed its function in influencing the formulation of policies on customs in West Sumatra, LKAAM participate actively in the formulation of provincial regulation on nagari, which has been in the beginning of its discussion at the beginning 2015, LKAAM participates and is active in the process the provincial regulation About nagari and in accordance with the function of LKAAM as a communications institution of adat, by participating actively LKAAM in the formulation of provincial regulation about nagari aspirations, hopes and suggestions of the community about adat has LKAAM convey and strive in the formulation local regulations About Nagari.

Keywords: Political Power, Civil Society Organizations, NGO, Provincial Regulation.